

ARTIKEL

Mengapa Partai Islam Belum Pernah Menang?: *Path Dependence Repetition* Kekalahan Partai Islam Indonesia Dalam Pemilu Legislatif 1955 Hingga 2019

Agus Riyanto

186-217

Gerakan Syarikat Islam Kembali Ke Khittah Tahun 1905

Gugun Wardiono, Bowo Sugiarto, Ahmad Rofik

218-239

Internationalization Of Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* Through Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU): Motivation And Contribution

Andi Purwono

240-257

Dinasti Politik: Basis Politik dan Kepuasan Publik

Wimmy Haliim, Andy Ilman Hakim

258-273

Analisis Biopolitik Dan Kontrol Populasi Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana Di Kota Samarinda

M. Najeri Al Syahrin, Mochamad Dziaqie Aulia Al Farauqi, Sri Wahyuni Jamal

274-295

Pemanfaatan Modal Sosial Appi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar

Hidayat Doe, Muhammad, Sukri, Ariana

296-312

RESENSI BUKU

Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan

Sunardi

313-317

DINASTI POLITIK: BASIS POLITIK DAN KEPUASAN PUBLIK

Wimmy Haliim¹, Andy Ilman Hakim²

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya^{1,2}

Email: wimmymyfisip@ub.ac.id¹, andyilmanhakim@ub.ac.id²

Abstrak

Terbukanya akses politik di negara yang tengah melewati masa transisi demokrasi memunculkan “raja-raja kecil” melalui praktik dinasti politik di daerah. Mereka mengisi ruang perpolitikan lokal dengan menata kembali jaringan patronase dan memperkuat basis sosial, ekonomi, maupun politik demi mempertahankan kekuasaannya. Praktik dinasti politik semacam ini cenderung memunculkan sentimen negatif terhadap kinerja birokrasi. Kebijakan yang lahir tidak diperuntukkan kepada publik, namun dikelola untuk menguntungkan dinasti. Fokus penelitian ini menjelaskan bagaimana dampak dinasti politik keluarga Sutrisno melalui birokrasi dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan capaian program yang telah dijalankan. Mengingat dampak dari praktik dinasti politik keluarga Sutrisno, sebagian menunjukkan anomali. Temuan dari hasil penelitian ini menggambarkan tingkat kepuasan publik tinggi terhadap kinerja birokrasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di samping karena faktor dinasti keluarga Sutrisno yang mapan secara politik dan berkonsekuensi pada kekuasaan atas kendali birokrasi, basis sosial jaringan keluarga Sutrisno juga berperan penting meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kerja birokrasi di berbagai bidang.

Kata Kunci:

Dinasti, Sutrisno, Kepuasan Publik

Abstract

The opening of political access in a country that was going through a period of democratic transition gave rise to "little kings" through the practice of political dynasties in some regions. They fill the local political space by restructuring patronage networks and strengthening their social, economic and political bases in order to maintain their power. This kind of dynastic political practice generates negative sentiments towards the performance of the bureaucracy as the public policy tend to be beneficial for a particular political family. The research focuses on the impact of the Sutrisno family's political dynasty through the bureaucracy on the level of community satisfaction towards the performance and achievements of their programs. Given the impact of the Sutrisno family's dynastic political practices, some of them show an anomaly. The findings illustrate the high level of public satisfaction with the performance of the bureaucracy in the health, education, and economy sectors. Apart from the fact that the Sutrisno family dynasty was politically established and had consequences for control of the bureaucracy, the social base of the Sutrisno family network also played an important role in increasing public acceptance of bureaucratic work programs in various fields.

Keywords:

Dynasty, Sutrisno, Public Satisfaction

Pendahuluan

Esensi demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi pada kehendak rakyat. Di Indonesia, berakhirnya rezim otoritarian Soeharto tahun 1998 memunculkan babak baru lahirnya sistem politik yang demokratis dengan berbagai bentuk dinamika hingga pada tataran daerah. Selain ditandai adanya mekanisme pemilihan umum, perkembangan demokrasi juga diikuti dengan upaya desentralisasi yang membuka ruang pemilihan langsung kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten, hingga desa. Terbukanya akses politik, tidak saja meningkatkan partisipasi politik masyarakat namun justru memunculkan “raja-raja kecil” melalui praktik dinasti politik. Menurut Hadiz, mereka adalah pemain-pemain penting dalam perpolitikan lokal yang di masa sebelumnya menduduki posisi lapis terbawah dalam jaringan patronase Orde Baru.¹ Kini dalam sistem yang demokratis, mereka menata diri kembali dalam jaringan patronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair dan saling bersaing satu sama lain.

Setidaknya ada tiga model dinasti politik yang bisa kita pahami di dalam perpolitikan di Indonesia, yaitu model regenerasi, model dinasti lintas kamar, dan model dinasti lintas daerah. Model dinasti regenerasi adalah dinasti politik yang berlangsung di satu daerah dengan mengusung kandidat yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan pemimpin sebelumnya. Seperti contoh, setelah A memimpin suatu daerah selama dua periode, maka akan memberikan tampuk kekuasaan kepada B, seorang yang memiliki ikatan keluarga dengan A (misalnya: istri, anak, kakak, ataupun adiknya).²

Model dinasti lintas kamar adalah dinasti yang terjadi karena kerabat yang masih satu keluarga itu ada yang menjadi pejabat di suatu dinas atau anggota DPRD setempat, bahkan bisa tersebar masing-masing di lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam kondisi ini, kontrol dari masyarakat dan fungsi *check and balances*, itu sulit terjadi. Bukan

¹ Vedi Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005).

² Paisal Akbar & Eko Priyo Purnomo, “Model Dinasti Politik Di Kota Bontang” dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 2 (2019), h. 145-156.

rahasia umum jika dalam dinamika pembuatan kebijakan di daerah sering sekali *adem ayem*, tanpa dialektika yang berarti.³

Model yang terakhir adalah model lintas daerah. Model ini adalah dinasti yang coba dibangun oleh oligark yang menginginkan pengaruh atau kekuasaannya di tempat lain, dengan menempatkan salah satu orang dari keluarganya. Misalnya, anak seorang kepala daerah atau orang yang masih satu keluarga dengan kepala daerah di suatu tempat, itu menjadi pejabat publik di daerah lain.⁴

Dari tiga model tersebut, yang menarik perhatian peneliti adalah model pertama dengan kasus yang berada di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri adalah contoh sempurna dari politik dinasti model regenerasi. Sudah empat periode dinasti Sutrisno terbangun di Kabupaten Kediri. Dimulai Sutrisno sendiri yang berkuasa selama dua periode (1999-2009) kemudian diteruskan oleh istrinya, Hariyanti Sutrisno yang juga menjabat selama dua periode (2010-2020). Keduanya juga diusung oleh partai yang sama, Partai Demokrasi Indonesia–Perjuangan (PDIP). Karena fenomena itulah, mencatatkan politik dinasti paling lama di Indonesia terjadi di Kabupaten Kediri.⁵

Menurut artikel dan penelitian terdahulu, politik dinasti menyebabkan efek negatif terhadap perkembangan demokratisasi di Indonesia, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya *checks and balances*, menjadi lemah.⁶ Kemudian menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti.⁷ Sehingga memunculkan sentimen negatif atas praktik dinasti politik yang tidak terlepas dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan

³ Didik Gunawan Suharto, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Mantrini Indri Hapsari & Lungid Wicaksana, “Pilkada, Politik Dinasti, dan Korupsi” dalam *Prosiding Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Sehat, Jujur, Adil dan Akuntabel* - Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia, Tanjungpinang, 15 November (2017).

⁴ *Ibid.*

⁵ Umar Mukhtar, “Kabupaten Kediri Catat Dinasti Politik Pertama dan Terlama” dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/01/07/ojej10382-kabupaten-kediri-catat-dinasti-politik-pertama-dan-terlama> diakses 1 November 2020.

⁶ Marcus Mietzner, *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System* (Sydney: Lowy Institute, 2009).

⁷ Alim Bathoro, “Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi” dalam *Jurnal FISIP UMR AH*, Vol. 2, No. 2 (2011), h. 115-125.

kepala daerah dan dinasti politiknya.⁸ Korupsi dan nepotisme akan terus berlangsung di dalam pemerintahan yang di dalamnya melekat praktik politik dinasti.

Jika tesis tersebut menjadi dasar dampak dari praktik politik dinasti, seharusnya yang terjadi adalah pemerintahan yang dijalankan tidak berlangsung dengan baik. Kebijakan yang lahir tidak diperuntukkan kepada publik, namun dikelola untuk menguntungkan dinasti. Ujungnya adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja birokrasi pemerintahan daerah juga akan rendah. Sehingga, secara tidak langsung tingkat keterpilihan (*electability*) kandidat yang terjangkit dinasti politik yang sudah dibangun sebelumnya kemungkinan akan melemah. Namun yang terjadi di Kabupaten Kediri melalui praktik dinasti politik keluarga Sutrisno yang telah berkuasa selama 20 tahun tidak demikian.

Jika dinasti politik Sutrisno mengeksploitasi pemerintahannya untuk kepentingan dinastinya, seharusnya yang terjadi tingkat keterpilihan ataupun kepercayaan publik terhadap dinastinya akan melemah. Beberapa data temuan lapangan menunjukkan tidak sepenuhnya demikian. Empat periode dinasti politik Sutrisno melenggang mulus dengan memenangkan pilkada Kabupaten Kediri setiap periodenya. Fokus penelitian ini menjelaskan bagaimana dampak dinasti politik keluarga Sutrisno melalui birokrasi dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan capaian program yang telah dijalankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan.⁹ Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang “kaya” untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus.¹⁰ Maka dari itu, metode pengumpulan data yang dipilih peneliti adalah *random sampling* yang terbagi di beberapa kecamatan yaitu, (1) Kecamatan Gurah sebagai

⁸ Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia” dalam *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 111-119.

⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (USA: Sage publications, 2013).

¹⁰ Wimmy Haliim, “Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013” dalam *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 2, No. 2 (2017), h. 201-226.

kecamatan yang paling dekat dengan pusat Kabupaten; (2) Kecamatan Papar (Utara), Kecamatan Kras(Selatan), Kecamatan Tarokan (Barat), dan Kecamatan Kandangan (Timur), sebagai perwakilan kecamatan yang memiliki letak berbatasan dengan kabupaten lain dan jauh dari pusat kabupaten.

Penentuan responden menggunakan metode *random sampling* (sampel acak). Data diambil dari total 100 responden yang akan dipilih secara acak dari masing-masing kecamatan yang sudah ditentukan. Meskipun menggunakan sampel acak, namun dalam proses wawancaranya penelitian ini menggunakan *in depth interview* kepada setiap responden untuk menjawab pertanyaan penelitian keterkaitan dinasti politik yang dibangun keluarga Sutrisno dengan tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Kediri terhadap kinerja dan capaian program Pemerintah Kediri. Sehingga informasi yang didapatkan lebih mendalam. Jadi penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian dengan metode campuran (*Mix Method*).

Penentuan sektor ekonomi dan sosial oleh peneliti dikarenakan, peneliti melihat bahwa sektor tersebut adalah sektor yang sangat berhubungan dengan kebutuhan mendasar dari sebuah masyarakat. Kedua sektor tersebut akan peneliti lihat berdasarkan dari kinerja Pemerintah Kediri di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dari kinerja bidang tersebut, peneliti juga akan turunkan kepada tingkat kepuasan masyarakat dalam capaian program-program yang mencakup bidang ekonomi dan sosial. Capaian program yang ingin peneliti lihat adalah program pengembangan pariwisata, program menciptakan lapangan kerja, program dalam mendorong koperasi dan UMKM, program pendidikan dan kesehatan terjangkau.

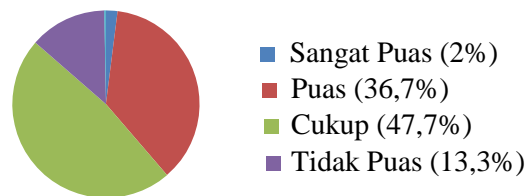
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan praktik dinasti politik yang cenderung menciptakan citra negatif. Fenomena dinasti politik di Kabupaten Kediri justru menunjukkan sebagian anomali terutama dalam aspek respon masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Kepuasan publik terhadap kinerja dan capaian program Pemerintah Kediri di bidang sosial-ekonomi yang dipimpin Bupati Hariyanti Sutrisno, menunjukkan tren positif. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil respon 100 orang responden melalui pengumpulan data penelitian dengan menggunakan metode *random sampling* yang terbagi dalam 5 kecamatan.

Tabel 1:
Tingkat Kepuasan Publik Pada Kinerja Bidang Sosial Ekonomi (%)

	Sangat Puas	Puas	Cukup	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas
Kinerja Kesehatan	1	40	47	12	0
Kinerja Pendidikan	5	42	40	12	1
Kinerja Ekonomi	0	28	56	16	0

Diagram 1:
Rataan Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Bidang Sosial Ekonomi



Kepuasan publik terhadap kinerja di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi dilihat dari aspek pelayanan yang dapat diakses masyarakat menunjukkan mayoritas responden memberikan respon positif. Kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama Pemerintah Kediri. Masyarakat merasa pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah garda terdepan untuk memantau kesehatan masyarakat. Hal tersebut ditanggapi baik oleh Pemerintah Kediri. Pemerintah Kediri beranggapan bahwa Puskesmas adalah lini pertama program pemerintah terkait kesehatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, keberadaan Puskesmas dirasakan sangat penting. Hal ini dikarenakan, Puskesmas selain memberikan pelayanan kesehatan berobat masyarakat saat sakit, juga ambil bagian aktif dalam pencegahan, sosialisasi dan penyuluhan terkait peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat.

Untuk membuktikan akan keseriusan dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Bupati Kediri sering menghadiri peresmian gedung baru Puskesmas yang ada di Kabupaten Kediri. Salah satunya ada di Kecamatan Mojo. Puskesmas Kecamatan Mojo merupakan salah satu Puskesmas yang memiliki fasilitas

rawat inap. Peresmian Puskesmas di Kecamatan Mojo dilakukan secara simbolis dengan ditandai pemotongan pita dan penandatanganan prasasti.

Perhatian Pemerintah Kediri dalam bidang pendidikan juga ditunjukkan dengan perluasan kesempatan belajar untuk warga yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa. Masyarakat yang tergolong tidak mampu, terlebih yang masih memiliki putra-putri yang mengenyam pendidikan dasar dan menengah namun berprestasi merasakan manfaat beasiswa mulai jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa ini dilakukan Pemerintah Kediri untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat. Pemerintah Kediri bekerjasama dengan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Kediri untuk membantu sosialisasi dari program pendidikan ini. Harapan program ini adalah tidak adanya lagi anak putus sekolah karena terkendala biaya. GNOTA adalah sebuah organisasi sosial nirlaba, independen dan transparan yang didirikan pada tanggal 29 Mei 1996. Ini adalah sebuah gerakan inisiatif dari Pemerintah Kediri dan masyarakat untuk menjaga agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar sebagai landasan meraih masa depan yang lebih baik.¹¹

Dari segi pertumbuhan ekonomi, secara garis besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Hal tersebut juga didukung fakta bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kediri selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari semula 68,91% di tahun 2015 meningkat menjadi 69,87% pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 menjadi 70,74% (BPS Kabupaten Kediri 2017-2019). Beberapa responden juga merasakan bahwa pengaruh positif kinerja Pemerintah Kediri di bidang sosial, seperti kesehatan dan pendidikan, berdampak kepada kehidupan ekonomi mereka. Peneliti juga meyakini bahwa kekuatan program sektor ekonomi dan sosial menjadi faktor penting dibalik tren positif kepuasan publik dari kinerja Pemerintah Kediri yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan sosial hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.

¹¹ Nilam Cahyaningtyas & Mohammad Arif Affandi, "Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri: Pertukaran Sosial Tim Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri Dengan Warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang" dalam *Paradigma*, Vol. 6, No. 1 (2018), h.1-8.

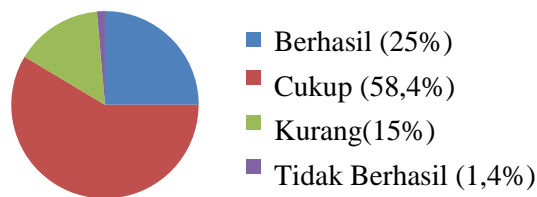
Kekuatan Program Sektor Ekonomi dan Sosial

Setelah melihat kepuasan publik terhadap kinerja, peneliti juga melihat respon para responden terhadap capaian keberhasilan pelaksanaan program-program sosial ekonomi yang telah dilakukan Pemerintah Kediri.

Tabel 2:
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Capaian Program di Bidang Sosial Ekonomi (%)

Program	Berhasil	Cukup	Kurang	Tidak Berhasil
Pengembangan Pariwisata	44	48	6	2
Menciptakan Lapangan Kerja	6	63	29	2
Mendorong Kinerja Koperasi dan UMKM	15	74	10	1
Pendidikan Terjangkau	36	48	15	1
Kesehatan Terjangkau	24	60	15	1

Diagram 2:
Rataan Kepuasan Publik Terhadap Capaian Program di Bidang Sosial Ekonomi



Respon yang positif dari para responden terkait kinerja dan capaian keberhasilan program Pemerintah Kediri menjadi dasar bagi peneliti tertarik untuk melihat bagaimana cara Hariyanti Sutrisno meraih simpati publik melalui program-program di sektor ekonomi dan sosial. Menurut BPS Kabupaten Kediri (2017-2019), Kabupaten Kediri menunjukkan tren positif dalam bidang sosial ekonomi, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka harapan sekolah yang meningkat, angka penduduk miskin dan angka pengangguran yang menurun setiap tahunnya. IPM di Kabupaten Kediri selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 70,47% di tahun 2017, meningkat menjadi 71,07% pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 menjadi 71,85%. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kediri selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren positif. Untuk harapan lama sekolah tahun 2017 sebesar 12,86%, kemudian pada tahun 2018 sebesar 12,87% dan pada tahun

2019 menjadi 12,88%. Sementara itu untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kediri tahun 2017 sebesar 7,65%, pada tahun 2018 sebesar 7,68% dan pada tahun 2019 menjadi 8,01%.

Kemudian berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur (2018-2019), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri mengalami penurunan dari 191 ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi sebesar 177 ribu jiwa di tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 163 ribu jiwa atau 10,42%. Ada perubahan sebesar 0,89% dibanding tahun 2018. Begitu juga angka pengangguran penduduk Kabupaten Kediri juga menunjukkan tren positif. Pemerintah Kediri mampu menekan angka pengangguran dari 4,25% pada tahun 2018 menjadi 3,68% pada tahun 2019. Paparan angka-angka statistik yang cukup mengesankan dari sebuah pemerintahan daerah yang dipimpin oleh aktor politik yang merupakan bagian dari dinasti politik. Hasil ini linear dengan kepuasan publik terhadap kinerja dan capaian program yang memang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Dalam rangka menekan angka pengangguran, Pemerintah Kediri memiliki beberapa program. Di antaranya adalah program menggelar bursa kerja (*job fair*) dan menggelar festival UMKM. Pada pertengahan tahun 2019, Pemerintah Kediri membuka 1.750 lowongan pekerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan mengadakan *UMKM Shopping Festival* setiap tahunnya. Terhitung sebesar 35,65% lapangan usaha pada bidang pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan masih banyak digeluti oleh masyarakat Kabupaten Kediri. Sementara jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2017 mencapai 27,2 ribu orang. Jumlah ini berkurang sekitar 13 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2015 lalu.

Data BPS Kabupaten Kediri tahun 2017 memperlihatkan bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 35,65%, sektor perdagangan 22,43%, jasa masyarakat dan sosial perorangan 14,16%. Perolehan paling sedikit adalah pada sektor listrik, gas dan air sebanyak 0,33%. Sektor pertanian memegang perolehan paling tinggi di antara seluruh sektor dengan didukung oleh luas lahan pertanian 61,88%. Pada jenis pekerjaan sendiri seperti karyawan atau pegawai mencapai 280.955 orang pada tahun 2017. Jumlah ini meningkat sebanyak 66.337 dibandingkan tahun 2015. Sedangkan pada buruh tetap mengalami penurunan pada tahun 2017. Sebanyak 127.532 orang dan jumlah tersebut menurun sebesar 6,66% atau sekitar 9.094 orang. Sektor pertanian

dengan status pekerja bebas meningkat sebesar 21,12% dibandingkan tahun 2015 menjadi 97.015 orang.

Kemudian program lain yang dinilai berhasil oleh masyarakat adalah program pengembangan pariwisata. Program percepatan pembangunan pada sektor pariwisata terus dilakukan oleh Pemerintah Kediri. Setelah wisata Gunung Kelud yang sudah menjadi tujuan utama wisatawan kini pemerintah membidik peluang wisata yang ada lereng Gunung Wilis, yaitu wisata Besuki. Infrastruktur pendukung pariwisata seperti persediaan air untuk pengunjung dan perbaikan lokasi-lokasi yang rawan longsor dilakukan. Pembangunan ini akan berdampak semakin banyaknya jumlah pengunjung yang datang. Jika semakin banyak yang datang juga akan berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar yang bergantung pada sektor pariwisata di antaranya yang membuka warung di sekitar kawasan Besuki. Yang menarik dari pelaksanaan dan pengawasan program ini adalah Sutrisno yang menjabat sebagai Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3). Didasarkan dari hasil wawancara dengan para responden, peneliti menilai kehadiran figur Sutrisno di dalam pemerintahan Hariyanti Sutrisno menjadi penunjang kesuksesan program-program pemerintahannya.

Pengaruh Figur Sutrisno dalam Politik dan Birokrasi

Pengaruh figur keluarga Sutrisno sejak tahun 1999 menjadikan birokrasi jauh lebih mapan secara politik, tetapi bukan pada sistem. Kekuasaan yang sudah dibangun oleh dinasti ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan politik mereka sendiri dan para kerabat. Semisal, dengan menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri pribadi ataupun untuk mendanai partai dan praktik patron-klien yang merupakan faktor pendukung penting suksesnya pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Dinasti ini juga sudah membangun kekuatan politik antar partai dan birokrasi yang dikendalikan oleh anggota keluarganya. Konsekuensinya, kekuasaan atas kendali birokrasi serta kewenangannya akan semakin mudah untuk dijalankan. Bukan rahasia umum jika dinasti keluarga Sutrisno akan memberikan kesempatan lebih besar kepada anggota keluarga untuk menduduki jabatan tertentu dibandingkan dengan kandidat di luar dinasti tanpa koneksi kerabat di dalam struktur kelembagaan partai politik ataupun birokrasi.

Kelihaian dinasti politik yang dibentuk keluarga Sutrisno adalah melakukan distribusi sumberdaya kepada para kliennya yang ada di daerah. Artinya, keluarga Sutrisno sebagai patron telah melakukan sebuah kewajiban untuk berbagi dengan elit lokal yang ada di tingkat desa melalui ruang-ruang yang disediakan oleh struktur sosial, ekonomi dan politik setempat. Hal tersebut bisa dibaca sebagai bentuk kepekaan sosial yang dilakukan sebuah dinasti politik terhadap lingkungannya disertai dengan motif politik tertentu. Sebagai dinasti politik yang berusaha menunjukkan jasa-jasa baik kepada masyarakat hingga elit lokal tertentu berupa bantuan dan pekerjaan atau jabatan, maka para klien berusaha membalas kebaikan-kebaikan tersebut dengan tetap setia berada dalam jaringan dinasti politik. Salah satu contohnya adalah elit lokal setiap desa yang terindektifikasi sebagai klien yang setia kepada patron dengan memberikan dukungan dan mobilisasi suara pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kediri.

Masyarakat di Kediri secara tidak langsung terkondisikan oleh sikap dan kebijakan Hariyanti Sutrisno sebagai bagian dari dinasti politik keluarga Sutrisno, dinasti yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten Kediri. Hariyanti Sutrisno yang menjabat dua periode, juga pernah memberikan suaminya jabatan yang sangat penting dalam pemerintahan Kediri yaitu menjadi Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa (TPPD) dan TP3. Dampaknya, jaringan politik yang dikelola keluarga Sutrisno tidak hanya dibebankan kepada Hariyanti Sutrisno sebagai Bupati Kediri. Namun, dikendalikan juga oleh Sutrisno dalam kerangka penguatan dinasti ini.

Banyaknya relasi pejabat hingga politisi (klien) yang bekerja dan mengabdikan dengan loyal di bawah kontrol dinasti politik ini dilakukan agar mereka mendapat imbal balik dalam bentuk jabatan atau proyek-proyek strategis dalam pembangunan. Konsekuensi banyak pihak yang berlomba-lomba mendekat dan siap membantu demi mencari keuntungan dari dinasti politik keluarga Sutrisno.

Hubungan timbal balik antara patron-klien yang saling menguntungkan inilah yang menjadikan bertahannya sebuah kekuasaan dalam satu wilayah. Ini merupakan salah satu bentuk pendekatan politik dengan cara melibatkan masyarakat dalam proyek ekonominya. Apalagi didukung dengan adanya anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat juga menjadikan segala kebijakan dari Hariyanti Sutrisno bisa berjalan dengan efektif. Dengan berada dibalik layar Sutrisno bisa lebih leluasa dalam mengatur jalinan

relasi keluarga yang menduduki kursi daerah beserta pejabat legislatifnya untuk tetap solid dan konsisten memperkuat dinasti politiknya.¹²

Selama lebih dari 20 tahun menjalankan dinasti politik, keluarga Sutrisno sudah menguasai beberapa asset-aset penting di Kabupaten Kediri, tidak hanya Sutrisno dan Hariyanti Sutrisno yang menjadi kepala daerah, beberapa anggota keluarga juga menduduki jabatan strategis di lembaga eksekutif maupun legislatif Kabupaten Kediri. Hal ini menjadi faktor pendukung keluarga Sutrisno dalam membangun dan mempertahankan dinasti politiknya. Seperti contoh adik ipar Sutrisno, Sulkani yang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri. Selain itu ada menantu Sutrisno, Rahmadi Yogiandoro yang menjabat Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kabupaten Kediri. Dinasti politik ini juga dibangun hingga akar rumput berupa Ketua Karangtaruna Kabupaten Kediri dan ada beberapa anggota keluarga lain yang menjabat posisi strategis pada sektor pemerintahan. Menurut banyak informasi yang didapatkan peneliti, keluarga Sutrisno minim lawan politik, hal ini dikarenakan dinasti politik ini berhasil mengondisikan masyarakat Kediri serta sifatnya yang sangat inklusif.

Basis Sosial Dinasti yang Kuat

Basis sosial merupakan salah satu pilar dinasti politik keluarga Sutrisno. Selama 20 tahun dinasti politik ini bertahan di Kabupaten Kediri karena kemampuannya menggunakan basis sosial yang kuat. Jaringan patronase juga terkonversikan melalui hubungan patron-klien sebagai dukungan politik selama 20 tahun lamanya. Pola ini terus berkembang dan cenderung statis sepanjang dinasti politik keluarga Sutrisno berkuasa. Kepemimpinan yang dihasilkan pun merupakan penerapan pendekatan dengan metode kultural (non-formal) dengan memakai kebijaksanaan dan komunikasi antar elit lokal dengan latar belakang yang beragam.

Dinasti politik yang dibangun oleh Sutrisno tidak lepas dari sejarah panjang pengalaman Sutrisno di birokrasi. Sebelum menjabat menjadi bupati Kediri, Sutrisno menjadi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kabupaten Kediri dalam bidang pertanian. Figur Sutrisno pada saat itu menjadi berpengaruh dan penting, bahkan sebelum menjadi

¹² Novendra Bimantara & Priyatno Harsasto, "Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri" dalam *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 7, No. 04 (2018), h. 201-210.

Ketua DPC PDIP. Menurut para responden yang mengetahui sejarah Sutrisno, Sutrisno dinilai sebagai personal dengan etos kerja yang baik dan juga pro terhadap *kawula alit* (masyarakat kecil). Di masa itulah Sutrisno melakukan komunikasi yang baik dengan pejabat desa hingga tokoh agama. Relasi itulah yang kemudian dibangun dan dijaga oleh dinasti politik keluarga Sutrisno hingga saat ini.

Kelihaian dan kejelian Sutrisno kemudian dikonversikan menjadi keuntungan politik. Buah komunikasi politik yang baik kepada banyak pihak membuat Sutrisno menjadi bupati pada tahun 1999 yang kala itu pemilihan kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Meskipun di saat bersamaan juga ada beberapa kandidat yang dicalonkan oleh beberapa anggota fraksi, namun saat musyawarah akhirnya Sutrisno yang terpilih menjadi Bupati pada saat itu. Di situlah awal mula Sutrisno membangun dinasti politiknya. Pada tahun 2004 pemilihan langsung pertama digelar, Sutrisno mencalonkan lagi sebagai Bupati dengan status Petahana. Sutrisno merasa bahwa program kerjanya dapat diterapkan dan masih perlu untuk dilanjutkan.

Jaringan Sutrisno dengan masyarakat desa sejak menjadi PPL memang dinilai sebagai titik awal penerimaan dinasti ini di mata masyarakat. Mereka melihat bahwa keluarga Sutrisno adalah keluarga yang dekat dengan masyarakat Kediri. Bahkan di antara mereka menyebut dirinya sebagai “*wargane pak Tris*” (sapaan akrab Sutrisno). Selama menjadi PPL, Sutrisno selalu menjaga relasi dan komunikasi yang cukup baik kepada banyak pihak terutama tokoh masyarakat hingga agama di desa yang ada di wilayah Kediri. Sutrisno menjalin kerjasama dengan menjanjikan pembangunan infrastruktur desa yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di desa. Beberapa desa yang satu dekade lampau tertinggal secara infrastruktur dan ekonomi, akhirnya 2-3 tahun yang lalu bisa menunjukkan perkembangannya. Sisi negatifnya, banyaknya kerabat Sutrisno mulai dari tingkat desa hingga daerah yang mendapatkan imbalan baik secara materiil maupun imateriil dalam bentuk jabatan atau diberikan proyek-proyek pembangunan strategis.

Cara lain keluarga sutrisno mempertahankan basis sosialnya adalah memanfaatkan budaya ataupun karakteristik masyarakat Kabupaten Kediri yang bercorak *mataraman*. Banyaknya pondok pesantren di Kabupaten Kediri mempertegas ciri khas yang kental dengan karakter *mataraman* Islam. Istilah, “*nderek kersane mbah yai*” merujuk pada kalimat yang biasa kebanyakan orang Kediri ucapkan yang tinggal di

desa dan daerah sekitaran pondok pesantren. Maksud dari kalimat tersebut adalah ikut apa kata kyai, apabila para kyai sudah memerintahkan maka bagi para warga atau masyarakat penganut agama Islam hal tersebut adalah anjuran yang harus ditaati atau diikuti dan sangat sukar untuk ditentang, apalagi jika dinasti Sutrisno sudah melakukan pendekatan sosial-ekonomi dibalik motif politiknya kepada masing-masing pondok pesantren.

Karena pengalaman panjang dalam mengarungi kehidupan ekonomi, sosial dan politik Kabupaten Kediri, dinasti politik keluarga Sutrisno faham sekali dalam mempengaruhi, membangun pengaruh hingga menarik massa untuk mendukungnya. Selain tokoh elit partai dan pengusaha, keluarga Sutrisno juga menjalin hubungan dengan banyaknya tokoh agama ulama dan kyai pimpinan pondok pesantren dalam berbagai kepentingan, dalam pilkada atau pengkondisian terhadap program-program yang dibuat. Dalam kehidupan tradisional orang Jawa hubungan antara hamba dan tuan tidak hanya bersifat formal, namun bisa sebaliknya. Hubungan ini lebih bersifat akrab dan pribadi, saling menghormati dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hubungan yang dibangun keluarga Sutrisno dengan lingkungan keagamaan (pondok pesantren), tidak didasarkan pada motif politik semata, namun bisa lebih dari pada itu. Dampaknya, pondok pesantren tidak merasa dimanfaatkan hanya untuk urusan politik semata, namun juga merasakan kebaikan dan keuntungan dari kepemimpinan keluarga Sutrisno. Alhasil, secara jangka panjang rasa hormat ditunjukkan tokoh agama, politik, dan masyarakat kepada Sutrisno dan keluarganya.

Jadi, peneliti melihat bahwa kepuasan publik terkait kinerja dan capaian program Pemerintah Kediri tidak hanya dilihat dari kepemimpinan Hariyanti Sutrisno. Para responden yang menjawab cukup hingga sangat puas masih berfikir bahwa pemimpin mereka adalah Sutrisno. Figus Sutrisno yang masih hadir dibelakang istrinya, membuat segan dan mempengaruhi psikologis responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelian. Meskipun banyak di antara responden yang bisa menjelaskan secara logis kenapa mereka puas dengan kinerja dan capaian program Hariyanti Sutrisno.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil temuan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik dinasti politik tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja birokrasi dengan sentimen negatif dari masyarakat. Fenomena dinasti politik keluarga Sutrisno di Kabupaten Kediri, pada sebagian aspek menunjukkan anomali. Konsep dinasti politik yang dibangun keluarga Sutrisno tidak secara menyeluruh mereduksi kinerja birokrasi terutama dalam bidang implementasi program dan pelayanan publik. Respon masyarakat justru menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap kinerja birokrasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pada aspek kesehatan, pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan dan kelengkapan fasilitas Puskesmas sebagai garda terdepan agar secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Di bidang pendidikan, upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar untuk warga yang kurang mampu diwujudkan dalam bentuk beasiswa dengan merangkul organisasi-organisasi donor. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, secara garis besar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kekuatan program-program yang menyentuh langsung pada lapisan masyarakat bawah menjadi faktor penting dibalik respon positif kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Kediri. Di samping itu, faktor keluarga Sutrisno yang mapan secara politik juga berkonsekuensi pada kekuasaan atas kendali birokrasi, serta basis sosial jaringan keluarga Sutrisno turut berperan penting meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kerja birokrasi di berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Paisal & Eko Priyo Purnomo, "Model Dinasti Politik Di Kota Bontang" dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 2 (2019), h. 145-156.
- Bathoro, Alim. "Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi" dalam *Jurnal FISIP UMRAH*, Vol. 2, No. 2 (2011), h. 115-125.
- Bimantara, Novendra & Priyatno Harsasto, "Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri" dalam *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 7, No. 04 (2018), h. 201-210.
- Cahyaningtyas, Nilam & Mohammad Arif Affandi, "Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri: Pertukaran Sosial Tim Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri

- Dengan Warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang” dalam *Paradigma*, Vol. 6, No. 1 (2018), h.1-8.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. USA: Sage Publications, 2013.
- Hadiz, Vedi. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005.
- Haliim, Wimmy. “Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013” dalam *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 2, No. 2 (2017), h. 201-226.
- Mietzner, Marcus. *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System*. Sydney: Lowy Institute, 2009.
- Mukhtar, Umar. “Kabupaten Kediri Catat Dinasti Politik Pertama dan Terlama” dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/01/07/ojej10382-kabupaten-kediri-catat-dinasti-politik-pertama-dan-terlama> diakses 1 November 2020.
- Nuritomo & Hilda Rossieta, “Politik Dinasti, Akuntabilitas, Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia” dalam *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, Mataram-Lombok, 24-27 September (2014).
- Suharto, Didik Gunawan, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Mantrini Indri Hapsari & Lungid Wicaksana, “Pilkada, Politik Dinasti, dan Korupsi” dalam *Prosiding Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Sehat, Jujur, Adil dan Akuntabel - Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia*, Tanjungpinang, 15 November (2017).
- Susanti, Martien Herna. “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia” dalam *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 111-119.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL POLITIK PROFETIK

Sebelum penulis mengirim naskah ke redaksi Jurnal Politik Profetik (JPP), sebaiknya mengikuti ketentuan dan sistematika penulisan di bawah ini:

A. Pedoman Untuk Artikel

1. Topik yang dipublikasikan oleh Jurnal Politik Profetik berhubungan dengan Politik Islam, Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik, Gerakan Sosial Islam dan Politik Lokal.
2. Masalah yang diangkat sebaiknya kasus 5 tahun terakhir (jika penelitian lapangan) yang memuat unsur kebaruan.
3. Naskah belum pernah dipublikasikan.
4. Sumber rujukan minimal 75% berasal dari jurnal ilmiah/buku terbitan lima tahun terakhir. Disarankan mengutip satu sampai tiga artikel dari terbitan Jurnal Politik Profetik.
5. Naskah yang dikirim ke JPP tidak dibenarkan dikirim ke penerbit lain untuk dipublikasikan sebelum ada keputusan dari pengelola JPP, dimuat atau tidaknya.
6. Panjang artikel sekitar 6000-8000 kata, namun naskah yang lebih panjang akan dipertimbangkan.
7. Naskah harus diserahkan untuk dipertimbangkan melalui website Jurnal Politik Profetik pada link <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/about/submissions#online>
Submissions
8. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman dan font size 12 pt..
9. Penulis harus bersedia untuk merevisi naskah berdasarkan masukan dari Editor dan Mitra Bestari.
10. Redaksi berhak menolak naskah yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan teknis, mengadakan perubahan susunan naskah, memperbaiki bahasa dan berkonsultasi dengan penulis sebelum naskah dimuat.
11. Sistematika Penulisan:
 - a. **Judul Artikel**
Judul artikel harus padat, jelas dan tanpa singkatan. Jumlah maksimal 16 kata.
 - b. **Nama Penulis**
Cukup nama penulis tanpa menyertakan gelar
 - c. **Profesi/Institusi dan Email Penulis**
 - d. **Abstrak**

Abstrak berisikan tentang: tujuan dan manfaat mansukrip ini, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pastikan kesemuanya itu dibuat dengan sepadat dan sejelas-jelasnya. Abstrak menggunakan Bahasa Indonesia dengan jumlah kata kisaran 150-250 kata.

e. Kata Kunci

Kata kunci merefleksikan ide pokok dari naskah. Kata kunci memuat maksimal 5 kata kunci.

f. Abstract

g. Keywords

h. Pendahuluan

Pendahuluan harus menggambarkan dengan jelas latar belakang masalah dan memuat pertanyaan apa yang akan dijawab dalam pembahasan. Bagian ini penulis mesti memberi argumen tentang pentingnya penelitian dilakukan. Pengutipan setiap karya tulis orang lain harus menggunakan Catatan Kaki/*Footnote* (Lihat Gaya Selingkung JPP). Istilah-istilah asing dicetak miring (*italic*).

i. Tinjauan Pustaka/*Literature Review*

Pada bagian ini semaksimal mungkin berisi uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Di sini perlu juga mempertegas kebaruan dari penelitian penulis.

j. Tinjauan Teori

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bagian ini, penulis boleh tidak menuliskan Subbab “Tinjauan Teori”, namun langsung menuliskan subbab nama teori dan penjelasannya.

k. Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data.

l. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, hasil penelitian dijelaskan secara komprehensif (singkat, padat dan jelas). Jika terdapat tabel dan gambar, atau figur-figur lainnya yang ada pada manuskrip, semuanya diletakkan simetris di tengah (seimbang antara kiri dan kanan). Bagian ini,

penulis boleh tidak menuliskan Subbab “Hasil dan Pembahasan”, namun langsung pada subbab inti persoalan yang sedang dibicarakan.

m. Kesimpulan

Kesimpulan menyesuaikan dengan apa yang diharapkan pada bagian pendahuluan di atas. Bagian ini dibuat dengan sesingkat dan sejelas mungkin.

n. Daftar Pustaka

Sumber rujukan minimal 75% berasal dari jurnal ilmiah/buku terbitan lima tahun terakhir. Disarankan mengutip satu sampai tiga artikel dari terbitan Jurnal Politik Profetik.

B. Pedoman Untuk Ulasan Buku

1. Harap sertakan di awal ulasan: Sampul Buku, Nama Penulis, Judul, Tempat, Penerbit, Tahun, Cetakan, Jumlah halaman, ISBN. Misalnya:



Syarifuddin Jurdi. *Muhammadiah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Cetakan: I. Halaman: xxxviii+520. ISBN: 9786028479943.

2. Buku yang diulas merupakan buku terbitan 2 tahun terakhir.
3. Ulasan ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman dan font size 12 pt..
5. Panjang rata-rata tulisan sekitar 2000-2500 kata.
6. Tinjauan harus dimulai dengan deskripsi singkat keseluruhan isi buku.
7. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam tubuh tinjauan meliputi:
 - Kekuatan dan kelemahan buku yang diulas.
 - Mengomentari gaya dan presentasi penulis.
 - Apakah tujuan penulis telah terpenuhi atau tidak.
 - Kesalahan (tipografi atau lainnya) dan kegunaan indeks.
 - Kepada siapa buku itu berguna dan direkomendasikan.
8. Penulisan referensi mengacu pada *Gaya Selingkung JPP*.
9. Sistematika Penulisan:

a. Judul

Judul ulasan harus padat, jelas dan tanpa singkatan. Jumlah maksimal 10 kata.

b. Identitas Buku

Identitas buku berisi Sampul Buku, Nama Penulis, Judul, Tempat, Penerbit, Tahun, Cetakan, Jumlah halaman, ISBN.

c. Nama Pengulas

Nama pengulas ditulis tanpa menggunakan gelar.

d. Afiliasi dan Email Pengulas

Institusi tempat pengulas bernaung serta alamat email yang dapat digunakan untuk berkorespondensi.

e. Isi Ulasan

Isi ulasan memuat tentang deskripsi singkat keseluruhan isi buku dan hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam tubuh tinjauan. Misalnya kekuatan dan kelemahan buku yang diulas, mengomentari gaya dan presentasi penulis, apakah tujuan penulis telah terpenuhi atau tidak, kesalahan (tipografi atau lainnya) dan kegunaan indeks serta kepada siapa buku itu berguna dan direkomendasikan.

f. Daftar Pustaka

Jika menggunakan sumber rujukan, maka pengutipan mengikuti *Gaya Selingkung JPP*.

GAYA SELINGKUNG JURNAL POLITIK PROFETIK

BUKU

Footnote:

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

Bibliography:

Jarry, David & Julia Jarry. *Collin Dictionary of Sociologi*. Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991.

ARTIKEL DALAM BUKU

Footnote:

¹Tom B. Bottomore, “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

Bibliography:

Bottomore, Tom B. “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.). *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1990.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Footnote:

¹Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

Bibliography:

Mkandawire, Thandike. “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679-681.

ARTIKEL PADA MEDIA MASSA

Footnote:

¹Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

Bibliography:

Mas’udi, Masdar F. “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

ARTIKEL DARI INTERNET

Footnote:

¹Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> diakses 31 Mei 2018.

Bibliography:

Rachman, Noer Fauzi. “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> / diakses 31 Mei 2017.

ARTIKEL PROSIDING

Footnote:

¹Noorhaidi Hasan, “Memahami Radikalisme Islam” dalam *Paper Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisasi Agama*, Depok, 19 Desember (2011).

Bibliography:

Hasan, Noorhaidi. “Memahami Radikalisme Islam” dalam *Paper Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisasi Agama*, Depok, 19 Desember (2011).

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Footnote:

¹Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”. *Skripsi*. (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

Bibliography:

Jumrah. “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016.

DOKUMEN RESMI

Footnote:

¹Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf diakses 1 Juli 2019.

Bibliography:

Mahkamah Konstitusi RI. “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf diakses 1 Juli 2019.

WAWANCARA

Footnote:

¹Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

Bibliography:

Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

ATURAN PENULISAN FOOTNOTE (*Ibid.*, *Op.Cit.*, *Loc.Cit.*)

Ibid

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²*Ibid.*

³*Ibid.*, h. 193.

Penjelasan contoh

- Menggunakan Ibid karena merujuk kepada catatan kaki di atasnya tanpa diselingi catatan kaki lainnya.
- ²Ibid. berarti pengarang, judul, dan halaman sama persis dengan catatan kaki yang di atasnya.
- ³Ibid., h. 193. berarti pengarang dan judul sama persis dengan catatan kaki yang di atasnya, hanya berbeda halaman. Halaman sebelumnya 188 dan yang dikutip terakhir halaman 193.

Op.Cit.

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Op.Cit.*, h. 193.

Penjelasan contoh

- Menggunakan Op. Cit. karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu: ²Thandike Mkandawire.
- Penggunaan ³David Jarry & Julia Jarry, *Op. Cit.*, h. 193. berarti pengarang (David Jarry & Julia Jarry) dan judulnya (*Collin Dictionary of Sociologi*) sama, hanya saja halamannya berbeda dengan catatan kaki yang pertama. Halaman sebelumnya 188 dan yang dikutip terakhir halaman 193.

Loc.Cit.

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Loc.Cit.*

Penjelasan contoh

- Menggunakan Loc. Cit. karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu: ²Thandike Mkandawire.
- Penggunaan ³David Jarry & Julia Jarry, *Loc.Cit.* berarti pengarang, judul, dan halamannya (h. 188) sama.